



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 700/12.A/Insp/2020

TENTANG

RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2020

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan Reformasi Birokrasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah ditetapkan perencanaan strategis lima tahunan melalui Keputusan Inspektur Nomor 700/10.A/Insp/ 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Inspektorat 2020 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, perlu disusun penjabaran pelaksanaan operasional tahunan berupa Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dnegan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2851) ;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023;
10. Keputusan Inspektur Nomor 700/10.A/Insp/ 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Inspektorat 2019-2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020.

KESATU : Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Inspektorat merupakan acuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2020 menuju tata kelola manajemen, pelayanan pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

KEDUA : Road Map Reformasi Birokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 07 Januari 2020

**Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta**



Nuryatna, SE, M.Si
Pembina UtamaMuda / IV C
NIP.19640214 199903 1 007

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Yth. Bupati Kabupaten Purwakarta;
- 2. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Lampiran Keputusan Inspektur

Nomor : 700/12.A/Insp/2020

Tanggal : 07 Januari 2020

Tentang : Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
Tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2020.

RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020

No	Area Perubahan/Program	Hasil Yang diharapkan	Kegiatan	Kriteria Keberhasilan (Output)	Tahapan Kerja	Bulan												Penanggung jawab
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A Sasaran : Birokrasi Yang bersih dan akuntabel																		
1	Program Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Aparatur serta keterlibatan pimpinan	Mengembangkan budaya kinerja dari level pimpinan sampai dengan staf berupa keterlibatan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan/peilaian/pengukuran kinerja	Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja	Menyusun Renja , Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Cascading kinerja,													Subag PEP & Tim RB
					Melakukan Reviu IKU dan Perjanjian Kinerja													
					Melaksanakan Monev Penilaian Pencapaian Kinerja secara berkala													
			Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Laporan Hasil Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan LAKIP													
				LHE SAKIP	Evaluasi Implementasi SAKIP													
				Cascading Kinerja	Menetapkan Cascading Kinerja dan Indikator Kinerja Individu sesuai Indikator kinerja													

[Type text]

2	Program Penguatan Pengawasan	Meningkatnya Kepatuhan dan efektifitas pengelolaan keuangan Negara, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dan meningkatnya integritas dalam pencegahan KKN	Penanganan Gratifikasi	SK Pedoman Penanganan Gratifikasi	atasannya												Subag PEP dan APIP	
					Pelaksanaan Publik Campign Gratifikasi													
					Pencatatan dan pelaporan gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)													
					Evaluasi pelaksanaan penanganan gratifikasi													
					Melaksanakan tindak lanjut evaluasi penanganan Gratifikasi													
				Penyampaian LHKPN & LHKASN														
			Penerapan SPIP	Dokumen Penilaian Risiko	Penyusunan Register Risiko													Subag PEP dan Tim RB
				Dokumen RTP	Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian Risiko (RTP)													
				Dokumen Hasil Pemantauan dan Penerapan SPIP	Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPIP													
			Penanganan Pengaduan Masyarakat	SP dan LHP Dumas	Menangani pengaduan masyarakat													
				TL LHP Dumas	Menindaklanjuti hasil penanganan Dumas													
				Dokumen Hasil Evaluasi Dumas	Melaksanakan evaluasi Penanganan Dumas													
				TL hasil Evaluasi Dumas	Menindaklanjuti hasil evaluasi Penanganan Dumas													
			Penerapan Whistle Blowing System	Pencatatan dan Pelaporan Whistle Blower System	Penanganan Whistle Blower System													
TL LHP Dumas Whistle Blower System	Menindaklanjuti Whistle Blower System																	

[Type text]

			Dokumen Hasil Evaluasi Whistle Blower System	Melaksanakan evaluasi Penanganan Whistle Blower System													
			TL hasil Evaluasi Whistle Blower System	Menindaklanjuti hasil evaluasi Penanganan Whistle Blower System													
		Penanganan Benturan Kepentingan	Pengisian Pernyataan Formulir Benturan Kepentingan, Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Mengimplementasikan Penanganan Benturan Kepentingan													
			Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	Melaksanakan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan													
		Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Spanduk ZI, Pakta Integritas seluruh pegawai	Pencanangan Zona Integritas (<i>Prioritas</i>)													
			SK Inspektur	Pemetaan dan Penetapan Unit Sampel WBK/WBBM (Seluruh Irbn, JFT dan Subag PEP)													
			Pencantuman Klausul terkait integritas pada SP Pemeriksaan, Pembuatan Pernyataan Integritas oleh Tim saat pemeriksaan	Pelaksanaan Pembangunan ZI, Penandatanganan pakta integritas													
			Laporan Hasil Evaluasi ZI	Melaksanakan Evaluasi ZI													

[Type text]

			Meningkatnya Peran APIP	Kualitas dan Kualitas APIP memadai	Pemenuhan kebutuhan APIP (<i>prioritas</i>)													Subag Kepeg n Umum	
				Anggaran APIP memadai	Pemenuhan Anggaran APIP													Subag Keuang an	
				PKPT berbasis Risiko	APIP melaksanakan fungsi consulting & assurance (Audit berbasis risiko)													Urban & APIP	
B	Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien																		
3	Program Manajemen Perubahan	Terwujudnya budaya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta integritas, profesionalisme, citra aparatur sebagai pelayan masyarakat semakin meningkat yang bermuara pada kepuasan pelanggan	Pembentukan Tim Birokrasi	SK Inspektur tentang Tim RB	Pembentukan Tim Pelaksanaan RB													Tim RB	
				SK Rencana Kerja Tim RB	Penyusunan Uraian Tugas Tim														
			Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	SK Inspektur tentang Roadmap RB	Penyusunan Rencana Kerja Tim RB														
						Penyusunan Roadmap RB													
						Penyusunan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) RB													
				Penetapan SK Roadmap RB															
			Sosialisasi/ Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi kepada Unit Kerja dan Pegawai	Terlaksananya sosialisasi Road Map RB kepada seluruh pegawai inspektorat	Sosialisasi melalui pertemuan dan website Inspektorat														
			Mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur	SK Pembentukan Agen Perubahan	Penunjukan Agen Perubahan														
						Penetapan SK Agen Perubahan													

[Type text]

			Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Inspektorat	Penetapan SK Pembentukan Tim PMPRB													
					Pelaksanaan PMPRB													
4	Program Deregulasi Kebijakan	Produk hukum inspektorat yang berkualitas, harmonis dan tidak tumpang tindih	Inventarisasi dan pemetaan kebijakan/produk hukum inspektorat	Peta Kebijakan/prduk hukum inspektorat	Inventarisasi analisis dan pemetaan produk hukum													Subag PEP & Tim RB
			Melakukan harmonisasi produk hukum Inspektorat	Produk hukum hasil revisi/harmonisasi	Melakukan revisi/harmonisasi atas produk hukum yang sudah tidak relevan atau tumpang tindih													
					Sosialisasi & Implementasi produk hukum													
			Peningkatan system pengendalian dalam penyusunan produk hukum Inspektorat	Sistem Registrasi / Logbook Produk Hukum Inspektorat	Pencatatan dan pengendalian atas setiap penyusunan baru/ revisi/ penghapusan produk hukum													
				Naskah akademik/kajian /paraf penyusunan produk hukum	Pelaksanaan pembahasan dan penyusunan kajian dalam penyusunan produk hukum													
		Hasil evaluasi pengendalian produk hukum	Evaluasi atas system pengendalian roduk hukum															
5	Program Penataan dan Penguat	Terbentuknya organisasi berbasis kinerja	Melakukan evaluasi Kelembagaan	Dokumen hasil evaluasi Kelembagaan	Melakukan evaluasi kelembagaan													

[Type text]

				Manajemen layanan SPBE diterapkan	Melaksanakan Manajemen layanan SPBE pada beberapa jenis layanan														
				Layanan Kepegawaian berbasis SPBE	Menerapkan Kepegawaian berbasis SPBE (melalui SIMPEG)														
				Laporan Kearsipan berbasis SPBE	Menerapkan Laporan Kearsipan Pengawaasan berbasis SPBE melalui Sistem Informasi manajemen Hasil Pemeriksaan (SIMHP) & Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan (SIPTL)														
				Layanan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja berbasis SPBE	Layanan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja berbasis SPBE (melalui E Planning, SIMDA perencanaan, SIMDA Keuangan, Aplikasi Kinerja TPP)														
				Layanan Publik berbasis SPBE	Menerapkan Layanan public berbasis SPBE (melalui aplikasi konsultasi online silikon dan website inspektorat)														
C	Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas																		
7	Program Penguatan SDM	Menigkatnya manajemen kinerja individu, sempurnanya system informasi kepegawaian	Perencanaan Kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi	Dokumen penghitungan kebutuhan pegawai	Penghitungan Kebutuhan Pegawai (5 tahunan)														Subag Kepegawaian & Umum
				Dokumen Perencanaan Distribusi Pegawai	Menyusun Rencana Redistribusi Pegawai														

[Type text]


	dan meningkatkan profesionalisme pegawai		Formasi Jabatan	Menyusun Formasi Jabatan															
			ANJAB & ABK	Menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)															
		Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN	Dokumen rekrutmen pegawai	Memberikan rekomendasi teknis pelaksanaan Rekrutmen pegawai inspektorat sesuai kewenangan															
		Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	SK Standar Kompetensi Pegawai	Menyusun SK Standar Kompetensi pegawai berdasarkan jenis jabatan															
			Dokumen identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	Menyusun identifikasi kebutuhan dan rencana pemenuhan pegawai berdasarkan kompetensi															
			Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi (Rencana Diklat, usulan diklat, DPA anggaran)	Menyusun identifikasi dan Rencana Pengembangan kompetensi pegawai															
			Sertifikat Pengembangan Kompetensi	Melaksanakan Diklat sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi															
			Hasil Monev Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	Melaksanakan Monev Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi															
		Promosi jabatan	Dokumen lelang	Pimpinan mengikuti															

[Type text]

				telah diterapkan																	
			Sistem Informasi Kepegawaian	Penerapan dan kemudahan menakses Sistem Informasi Kepeawaian	Pemutakhiran data secara berkala dan penyediaan fasilitas Sistem Informasi Kepegawaian																
8	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan sesuai standar serta Meningkatkan kualitas pelayanan public, indeks kepuasan masyarakat	Menerapkan standar pelayanan (Maklumat Pelayanan dan SOP)	SK Standar Pelayanan	Penyusunan SK Standar Pelayanan mencakup Maklumat Pelayanan													Sekretariat Inspektorat, Irbn, APIP			
					Melakukan Reviu Standar Pelayanan																
			Menerapkan Budaya Pelayanan Prima	Diterapkan pelayanan prima	Penerapan pelayanan prima																
			Pengelolaan Pengaduan	Diterapkan Pengelolaan Penaduan atas pelayanan inspektorat	Menyediakan media pengaduan dan konsultasi (Kotak pengaduan, call center)																
					Menetapkan Unit Pengaduan pelayanan																
					Pelaksanaan tindaklanjut pengaduan pelayanan																
					Melaksanakan Monev hasil tindaklanjut pengaduan pelayanan																
			Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan	Pengelolaan kepuasan pengguna layanan diterapkan	Menetapkan Tim Pengelola Survei kepuasan																
Dilaksanakan Survei kepuasan atas pelaksanaan pembinaan/pengawasan kepada Pengguna/obrik (prioritas)																					

[Type text]

				Mempublikasikan hasil survey kepuasan															
				Melaksanakan tindaklanjut hasil survey															
		Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan	Pembinaan, pengawasan dan monitoring tindaklanjut	Pemanfaatan aplikasi SIMDA, SIMBADA, LPSE, OMSPAM, SIPTL, SIMHP, PPID, DJIH, dll															


**Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta**
Nuryatna
Nuryatna, SE, M.Si
Pembina Utama Muda / IV C
NIP.19640214 199903 1 007